



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT



2023



RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023

RENJA KERJA 2023



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR : 550 - 233 - 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyiapkan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, perlu dirumuskan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022;
 - b. bahwa penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan melalui proses evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun sebelumnya, pembahasan diinternal Perangkat Daerah, pembahasan dengan melibatkan para pemangku kepentingan melalui Forum Perangkat Daerah serta verifikasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. bahwa penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

1. Penanggungjawab, bertugas sebagai berikut :
 - a. bertanggungjawab dan memberi keputusan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022;
 - b. bertanggungjawab dalam setiap tahapan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 serta Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022;
 - c. bertanggungjawab serta memimpin penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah untuk penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
 - d. bertanggungjawab dalam penelaahan terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD;
 - e. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan verifikasi administrasi dan faktual serta pemberian rekomendasi terhadap usulan proposal hibah;
 - f. melakukan validasi terhadap Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; dan
 - g. melakukan input indikator kinerja program, indikator kinerja kegiatan, serta kelompok sasaran kegiatan pada setiap kegiatan di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
2. Pengarah, bertugas sebagai berikut :
 - a. melakukan pendampingan dalam proses perencanaan pembangunan;
 - b. melakukan kajian dan analisa isu strategis untuk percepatan pembangunan dalam mewujudkan Sumbar Madani;
 - c. menyampaikan rekomendasi hasil kajian kepada Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan; dan
 - d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.

3. Ketua, bertugas sebagai berikut :
 - a. mengoordinir secara operasional dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 yang disusun oleh masing-masing Kelompok Kerja;
 - b. mengoordinir penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah untuk penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
 - c. mengoordinir penelaahan terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD;
 - d. mengoordinir terhadap pelaksanaan verifikasi administrasi dan faktual serta pemberian rekomendasi terhadap usulan prosposal hibah; dan
 - e. mengoordinir terhadap penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
4. Sekretaris, bertugas sebagai berikut :
 - a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022;
 - b. mengatur teknis operasional dalam penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah untuk penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
 - c. mengoordinasikan pengumpulan dan menganalisa data dan informasi sesuai dengan kebutuhan dalam bentuk deskriptif, tabel, grafik, peta dan sebagainya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sub unit;
 - d. menelaah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, dan pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi;

- e. menelaah dan menerapkan tahapan-tahapan perencanaan/pengendalian dan evaluasi serta konsep perencanaan dalam penyusunan dokumen sesuai peraturan yang berlaku;
 - f. melakukan sinkronisasi dan keselarasan penulisan serta substansi pada masing-masing Bab dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022; dan
 - g. mengoordinir pelaksanaan tugas Sekretariat dalam mendukung kelancaran proses penyusunan dokumen perencanaan antara lain dalam bentuk administrasi, penyediaan sarana dan prasarana, penyajian dokumen, publikasi dan distribusi serta penyebarluasan dokumen.
5. Koordinator Kelompok Kerja, bertugas sebagai berikut :
- a. mengoordinir dan menyusun substansi penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sub unit;
 - b. mengumpulkan dan menganalisa data dan informasi sesuai dengan kebutuhan dalam bentuk deskriptif, tabel, grafik, peta dan sebagainya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sub unit;
 - c. menelaah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, dan pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sub unit; dan
 - d. mengoordinir penyiapan bahan serta terlibat pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.
6. Anggota Kelompok Kerja, bertugas sebagai berikut :
- a. membantu Koordinator Kelompok Kerja dalam pelaksanaan tugas penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022;

- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data, bersama-sama dengan Ketua Kelompok Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sub unit;
 - c. melakukan perumusan dan penyusunan substansi yang berkaitan erat dengan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022; dan
 - d. menyiapkan bahan serta terlibat pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.
7. Anggota Sekretariat, bertugas sebagai berikut :
- a. membantu menyediakan sarana dan prasarana serta kelengkapan administrasi yang dibutuhkan dalam mendukung proses penyusunan dokumen;
 - b. membantu mengoordinasikan dan mengkomunikasikan proses penyusunan dokumen dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen;
 - c. mengkompilasi serta memperbaiki format dan bentuk hasil tulisan (bukan substansi tulisan) dari masing-masing kelompok kerja kedalam format dokumen yang telah diatur dan disepakati;
 - d. mengumpulkan, menyediakan, mengolah serta menganalisa data dan informasi serta evaluasi sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022; dan
 - e. membantu menyajikan hasil dokumen dalam bentuk paparan atau media lain dan mempublikasikan atau mendistribusikan dokumen dengan tujuan penyebarluasan dokumen.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 5 April 2022
GUBERNUR SUMATERA BARAT,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat	Penanggungjawab
2.	Tim Gubernur Untuk Percepatan Sumatera Barat Madani	Pengarah
3.	Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat	Ketua
4.	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	Sekretaris
Kelompok Kerja Bidang Angkutan Jalan, Perkeretaapian dan Pengembangan		
5.	Kepala Bidang Angkutan Jalan, Perkeretaapian dan Pengembangan	Koordinator
6.	Pejabat Fungsional Ahli Muda	Anggota
7.	Kepala Seksi Perkeretaapian	Anggota
8.	Kepala Seksi Pengembangan	Anggota
9.	Fungsional Umum Bidang Angkutan Jalan, Perkeretaapian dan Pengembangan	Anggota
Kelompok Kerja Bidang Lalu Lintas dan Pembinaan Keselamatan		
10.	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Pembinaan Keselamatan	Koordinator
11.	Pejabat Fungsional Ahli Muda	Anggota
12.	Kepala Seksi Lalu Lintas	Anggota
13.	Kepala Seksi Pengendalian Operasional	Anggota
14.	Fungsional Umum Bidang Lalu Lintas dan Pembinaan Keselamatan	Anggota
Kelompok Kerja Bidang Pelayaran		
15.	Kepala Bidang Pelayaran	Koordinator
16.	Pejabat Fungsional Ahli Muda	Anggota
17.	Kepala Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran	Anggota
18.	Kepala Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan	Anggota
19.	Fungsional Umum Bidang Pelayaran	Anggota
Kelompok Kerja UPTD Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah I		
20.	Kepala UPTD Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah I	Koordinator
21.	Kepala Subbagian Tata Usaha	Anggota
22.	Kepala Seksi Pengawasan & Pengendalian Operasional Terminal	Anggota
23.	Kepala Seksi Penyelenggaraan Terminal	Anggota
24.	Fungsional Umum UPTD Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah I	Anggota

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
Kelompok Kerja UPTD Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II		
25.	Kepala UPTD Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II	Koordinator
26.	Kepala Subbagian Tata Usaha	Anggota
27.	Kepala Seksi Pengawasan & Pengendalian Operasional Terminal	Anggota
28.	Kepala Seksi Penyelenggaraan Terminal	Anggota
29.	Fungsional Umum UPTD Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II	Anggota
Sekretariat		
30.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
31.	Fungsional Umum di Sekretariat Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.	Anggota

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun ke ketiga dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, dimana perencanaan sangat dibutuhkan dalam pembangunan daerah yaitu pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM). Maka Perencanaan Pembangunan Daerah harus dilakukan sebelum anggaran dan kegiatan untuk tahun yang akan datang berjalan, yaitu melakukan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kesempatan pada daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintah dan urusan kewenangan yang lebih luas pada daerah untuk kepentingan masyarakat berdasarkan potensi daerahnya. Pemberian kewenangan pada daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing

daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi dan pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan daerah.

Untuk mewujudkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka diperlukan rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang Perencanaan Jangka Panjang, Perencanaan Jangka Menengah maupun Perencanaan Tahunan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPN).

Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Selanjutnya dalam peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran/Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)

Secara hierarki penyusunan rencana kerja SKPD merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Renja SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pengertian Renja SKPD adalah :

1. Dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Renja OPD merupakan penjabaran Renstra OPD yang mengacu pada RKPD.
3. Renja OPD memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh OPD dalam satu tahun anggaran.
4. Renja OPD menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan OPD sesuai tupoksinya.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Nomor 03 Tahun 2018 dan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat. Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat sebagai instansi teknis dengan type B di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat bertanggungjawab kepada Gubernur dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan pada sektor perhubungan

Sejalan dengan dasar pikir diatas maka Dinas Perhubungan sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2022 ini menyusun Rancangan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat untuk Tahun 2023. Dimana Rancangan Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dalam Penyusunan Rencana Kerja OPD (Renja OPD) dilakukan melalui 2 (dua) tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses, meliputi:

1. Tahapan Perumusan rancangan Renja OPD

Perumusan rancangan Renja OPD, dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengolahan data dan informasi;
- b. Analisis gambaran pelayanan OPD;
- c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD;
- d. isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD;

- e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;
- f. Perumusan tujuan dan sasaran;
- g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
- h. Perumusan kegiatan prioritas;
- i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD;
- j. Penyempurnaan rancangan Renja OPD;
- k. Pembahasan forum OPD;
- l. Penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM.

2. Tahap penyajian rancangan Renja OPD

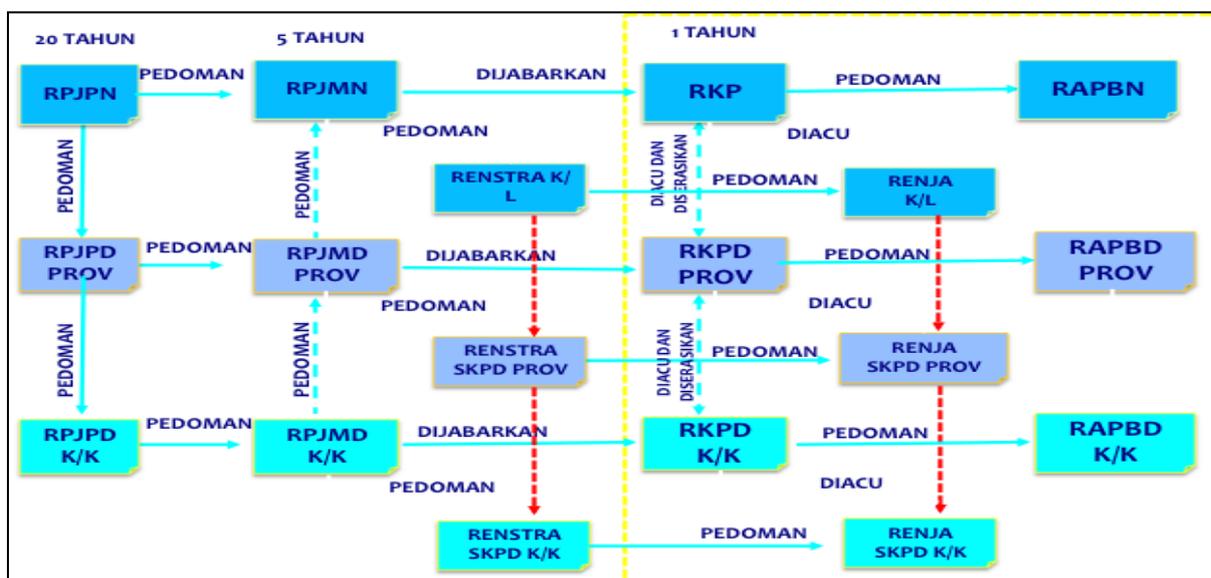
Dalam hal penyajian, sistematika penulisan dokumen Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017.

Sesuai Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 050/816/XI/P2EPD/Bappeda-2021 tanggal 30 November 2021 tentang Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Rencana Kerja (Renja) PD merupakan hasil penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat sebagai dokumen perencanaan tahunan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat yang memuat prioritas program dan kegiatan pada tahun anggaran 2023, serta berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja (Renja) PD akan memberikan pedoman dan arah dalam mendukung pencapaian target Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan keterkaitan Rencana Kerja (Renja) PD dengan Rencana Kerja (Renja) K/L dan Rencana Kerja (Renja) Kab/Kota dimaksudkan agar menjadi masukan dalam melakukan perumusan tujuan sasaran berdasarkan tupoksi Perangkat Daerah. Hal ini bertujuan agar antara program kegiatan dan target yang ada pada dokumen Rencana Kerja (Renja) K/L menjadi acuan dan

pedoman pada dokumen Rencana Kerja (Renja) PD didalam penyusunan program kegiatan. Juga ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kab/Kota terhadap sasaran Rencana Kerja (Renja) K/L dan Rencana Kerja (Renja) PD sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Sebagaimana ditunjukkan dalam gambar di bawah ini yang menunjukkan hubungan antara dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran.



Gambar 1.3 Gambaran keterkaitan dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran

1.2. Landasan Hukum

Pembuatan Dokumen Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 disusun dengan sistematika penulisan mengacu pada ketentuan pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017. Regulasi-regulasi yang menjadi acuan yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
5. Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMD), Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2017 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman

Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pencabutan 4 (Empat) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012;
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026
26. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 050/816/XI/P2EPD/Bappeda-2021 tanggal 30 November 2021 tentang Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023
27. Peraturan Gubernur Nomor Tahun 2022 tentang RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rancangan Renja 2023

Maksud Penyusunan Perubahan Renja ini adalah untuk dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun dalam mencapai prioritas pembangunan sarana dan prasarana transportasi tahun 2023.

Tujuan penyusunan Rancangan Renja Tahun 2023 adalah untuk memastikan bahwa Dokumen tersebut sebagai bahan penyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017, terdiri dari :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun Lalu (n-2) dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat tahun lalu (2021) adalah untuk mengetahui adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya, dimana tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, review didasarkan pada laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD dan perkiraan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA - Perangkat Daerah) tahun berjalan yang disahkan.

Disamping itu penyusunan Rancangan Renja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan Triwulan IV sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan tahun 2023;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

Pada Tahun Anggaran 2021 Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat awalnya mendapat alokasi anggaran Perhubungan sebesar **Rp. 19.595.290.300,-** (Sembilan Belas Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Tiga Ratus Rupiah), namun seiring berjalannya waktu Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

mengalami 3 (Tiga) kali pergeseran anggaran sehingga pada anggran Perubahan Tahun 2021 Dinas Perhubungan mendapat alokasi pagu sebesar **Rp. 17.218.151.040,-** (Tujuh Belas Milyar Dua Ratus Delapan Belas Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Puluh Rupiah), dengan realisasi anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak langsung **Rp. 16.698.513.066 (96,98%),-** (Enam Belas Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Enam Puluh Enam Rupiah). Secara keseluruhan realisasi keuangan dan fisik Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 dapat dilihat pada table berikut.

Tabel II.1 Kinerja Keuangan dan Fisik (Belanja Langsung) Tahun 2021 Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

NO	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
1	2	7	8	9	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp12.637.014.266	Rp12.213.385.131	96,65%	100
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp240.603.930	Rp236.221.717	98,18%	100
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp112.684.880	Rp108.395.900	96,19%	100
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp127.919.050	Rp127.825.817	99,93%	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp8.885.540.068	Rp8.539.363.591	96,10%	100
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp8.575.886.068	Rp8.249.190.991	96,19%	100
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp241.080.000	Rp222.960.000	92,48%	100
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp7.619.000	Rp7.366.000	96,68%	100
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp60.955.000	Rp59.846.600	98,18%	100
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp84.193.000	Rp83.335.381	98,98%	100
7	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp36.193.000	Rp35.504.210	98,10%	100
8	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Rp48.000.000	Rp47.831.171	99,65%	100
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp108.927.000	Rp108.702.451	99,79%	100
9	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp91.500.000	Rp91.316.000	99,80%	100
10	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp17.427.000	Rp17.386.451	99,77%	100
5	Administrasi Umum Perangkat	Rp522.062.680	Rp517.338.778	99,10%	100

NO	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
1	2	7	8	9	6
	Daerah				
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp42.300.000	Rp42.296.050	99,99%	100
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp10.495.000	Rp10.390.000	99,00%	100
13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp160.046.000	Rp158.026.396	98,74%	100
14	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp77.302.250	Rp77.296.470	99,99%	100
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp25.000.000	Rp24.030.000	96,12%	100
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp206.919.430	Rp205.299.862	99,22%	100
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp129.965.640	Rp128.765.000	99,08%	100
17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp129.965.640	Rp128.765.000	99,08%	100
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp1.901.169.414	Rp1.858.869.529	97,78%	100
18	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp14.000.000	Rp13.861.120	99,01%	100
19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp279.106.000	Rp261.648.204	93,75%	100
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp1.608.063.414	Rp1.583.360.205	98,46%	100
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp764.552.534	Rp740.788.684	96,89%	100
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp180.054.038	Rp171.866.526	95,45%	100
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp480.998.496	Rp479.054.558	99,60%	100
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp103.500.000	Rp89.867.600	86,83%	100
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rp3.564.285.380	Rp3.481.570.040	97,68%	100
9	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Rp1.268.255.419	Rp1.254.832.858	98,94%	100
24	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Rp1.057.110.526	Rp1.045.583.396	98,91%	100
25	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Rp211.144.893	Rp209.249.462	99,10%	100
10	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Rp329.127.787	Rp310.131.964	94,23%	100
26	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Rp100.000.000	Rp99.376.164	99,38%	100
27	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Rp52.890.100	Rp52.688.400	99,62%	100
28	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B	Rp176.237.687	Rp158.067.400	89,69%	100

NO	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
1	2	7	8	9	6
11	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Rp1.649.439.574	Rp1.630.207.968	98,83%	100
29	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Rp638.939.574	Rp630.050.750	98,61%	100
30	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Rp1.010.500.000	Rp1.000.157.218	98,98%	100
12	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Rp15.861.200	Rp10.550.850	66,52%	100
31	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Rp15.861.200	Rp10.550.850	66,52%	100
13	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Rp206.168.200	Rp205.405.400	99,63%	100
32	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Rp40.975.000	Rp40.648.800	99,20%	100
33	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Rp165.193.200	Rp164.756.600	99,74%	100
14	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp65.211.200	Rp64.462.000	98,85%	100
34	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Rp65.211.200	Rp64.462.000	98,85%	100
15	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp30.222.000	Rp5.979.000	19,78%	100
35	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rp30.222.000	Rp5.979.000	19,78%	100
III	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rp759.981.394	Rp753.191.268	99,11%	100
16	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	Rp76.500.000	Rp75.422.675	98,59%	100
36	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rp1.500.000	Rp1.500.000	100,00%	100
37	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Rp75.000.000	Rp73.922.675	98,56%	100

NO	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
1	2	7	8	9	6
17	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp74.477.694	Rp73.625.606	98,86%	100
38	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Rp74.477.694	Rp73.625.606	98,86%	100
18	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Rp25.000.000	Rp24.770.314	99,08%	100
39	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Rp25.000.000	Rp24.770.314	99,08%	100
19	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Rp447.288.700	Rp446.738.503	99,88%	100
40	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Rp447.288.700	Rp446.738.503	99,88%	100
20	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Rp50.000.000	Rp47.794.136	95,59%	100
41	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Rp50.000.000	Rp47.794.136	95,59%	100
21	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp86.715.000	Rp84.840.034	97,84%	100
42	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp86.715.000	Rp84.840.034	97,84%	100
IV	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Rp256.870.000	Rp250.366.627	97,47%	100

NO	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
1	2	7	8	9	6
22	Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp35.230.000	Rp34.265.250	97,26%	100
43	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Provinsi	Rp35.230.000	Rp34.265.250	97,26%	100
23	Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	Rp186.200.000	Rp181.982.627	97,74%	100
44	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Rp186.200.000	Rp181.982.627	97,74%	100
24	Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan Melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp35.440.000	Rp34.118.750	96,27%	100
45	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan Menjadi Kewenangan Provinsi	Rp35.440.000	Rp34.118.750	96,27%	100

Dari tabel kinerja keuangan dan fisik tahun 2021 Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pagu anggaran (Belanja Langsung) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 sebesar **Rp. 8.642.264.972,-** sedangkan realisasi keuangan mencapai **Rp. 8.449.322.075,-** dengan persentase realisasi keuangan (Belanja Langsung) sebesar **97,77%** dan persentase realisasi fisik 100%.

Untuk lebih jelasnya, hasil pelaksanaan capaian kinerja dari program dan kegiatan selama tahun anggaran 2021 di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2021 yang disajikan dalam bentuk Tabel II.2 berikut:

Kode	Urusan / Bidang / Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Pada Tahun 2021 - 2026		Satuan	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2021 s/d 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program , Kegiatan dan Sub kegiatan (Renja PD Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan					
			Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021			Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11=(6+8+ 10)	12=(11/4)				
			K	Rp.												
2	1 5	1	1.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya (pengelola keuanagn. pengelola barang milik daerah, pengelola sistem informasi, pengelola PPHPK)	72	1,500,00 0,000	Bulan		12	12	100	12	24	33,33%
2	1 5	1	1.0 2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Laporan Keuangan akhir tahun	6	45,000,0 00	dokumen		1	1	100	1	2	33,33%
2	1 5	1	1.0 2	7	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Dokumen Laporan Bulanan/Triwulan/Semest er	72	380,000, 000	Bulan		12	12	100	12	24	33,33%
2	1 5	1	1.0 3		Administrasi Barang Milik daerah pada perangkat daerah	Terlaksananya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	72	610,000 ,000	Bulan		12	12	100	12	24	33,33%
2	1 5	1	1.0 3	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen Laporan Barang Milik Daerah	12	310,000, 000	Laporan		2	2	100	2	4	33,33%
2	1 5	1	1.0 3	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jasa jaminan barang milik daerah : Gedung 1 Unit dan kendaraan dinas operasional 11 unit	72	300,000, 000	Bulan		12	12	100	12	24	33,33%
2	1 5	1	1.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya peningkatan disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur	72	880,000 ,000	Bulan		12	12	100	12	24	33,33%
2	1 5	1	1.0 5	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian dinas beserta perlengkapan yang disediakan	1080	580,000, 000	Stel		180	122	67,78	180	302	27,96%
2	1 5	1	1.0 5	1 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	ASN dinas perhubungan yang mengikuti Bimtek	60	300,000, 000	Orang		10	8	80	10	18	30,00%
2	1 5	1	1.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	72	4,300,0 00,000	Bulan		12	12	100	12	24	33,33%

Kode	Urusan / Bidang / Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Pada Tahun 2021 - 2026		Satuan	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2021 s/d 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub kegiatan (Renja PD Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
											Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1					2	3	4		5	6	7	8	9	10	11=(6+8+10)	12=(11/4)		
							K	Rp.										
2	1	5	1	1.0	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor yang disediakan	72	350,000,000	bulan		12	12	100	12	24	33,33%
2	1	5	1	1.0	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	72	250,000,000	Bulan		12	12	100	12	24	33,33%
2	1	5	1	1.0	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat tulis kantor yang disediakan	72	1,200,000,000	Bulan		12	12	100	12	24	33,33%
2	1	5	1	1.0	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetak dan penggandaan yang disediakan	60	450,000,000	Bulan		12	12	100	12	24	40,00%
2	1	5	1	1.0	6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan	18	150,000,000	jenis		3	3	100	3	6	33,33%
2	1	5	1	1.0	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	72	1,900,000,000	Bulan		12	12	100	12	24	33,33%
2	1	5	1	1.0	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	72	400,000,000	Bulan		12	12	100	12	24	33,33%
2	1	5	1	1.0	7	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana gedung kantor	6	400,000,000	Laptop		1	1	100	1	2	33,33%
									12		PC Unit		2	2	100	2	4	33,33%
									18		Printer		3	3	100	3	6	33,33%
2	1	5	1	1.0	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya tertib administrasi umum	72	12,834,000,000	Bulan		12	12	100	12	24	33,33%
2	1	5	1	1.0	8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang didistribusikan	60	84,000,000	Kali		10	10	100	10	20	33,33%
2	1	5	1	1.0	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan yang harus dibayar selama 1 Tahun	60	1,750,000,000	Bulan		12	12	100	12	24	40,00%

Kode	Urusan / Bidang / Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Pada Tahun 2021 - 2026		Satuan	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2021 s/d 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program , Kegiatan dan Sub kegiatan (Renja PD Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan				
			Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021			Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11=(6+8+ 10)	12=(11/4)			
			K	Rp.											
2	1 5	1	1.0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya honor Pokja, Pengadaan Barang Jasa, Gaji Outsourcing dan Lembur anggota korsik	72	11,000,0 00,000	Bulan	12	12	100	12	24	33,33%
							118		Pengaman	18	18	100	18	36	30,5%
							120		Cs	20	20	100	20	40	33,33%
							30		Sopir	5	5	100	5	10	33,33%
2	1 5	1	1.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya tertib administrasi umum	72	4,120,0 00,000	Bulan	12	12	100	12	24	33,33%
2	1 5	1	1.0 9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas operasional yang dipelihara	72	420,000, 000	Bulan	12	12	100	12	24	33,33%
2	1 5	1	1.0 9	9	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor yang dipelihara	36	3,000,00 0,000	Unit	6	6	100	6	12	33,33%
2	1 5	1	1.0 9	1 1	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peralatan gedung kantor yang dipelihara	72	700,000, 000	Bulan	12	12	100	12	24	33,33%
2	1 5	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas	14,7%		%	2,45	2,85	116,33	2,45	5,3	36,05%
						Persentase Fasilitas Utama dan Penunjang Terminal Tipe B yang terbangun	212,4 1		%	39,07	40,2	108,95	41,51	81.71	38,47%
2	1 5	2	1.0 2		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Tersedianya perlengkapan jalan pada ruas jalan provinsi di Sumatera Barat	24	6,800,0 00,000	kab/kota	8	4	50	3	7	29,17%

Kode	Urusan / Bidang / Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Pada Tahun 2021 - 2026		Satuan	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2021 s/d 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program , Kegiatan dan Sub kegiatan (Renja PD Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan					
			Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021			Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11=(6+8+ 10)	12=(11/4)				
			K	Rp.												
2	1 5	2	1.0 2	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Tersedianya perlengkapan jalan pada ruas jalan provinsi di Sumatera Barat	18	5,800,00 0,000	Kab/Kota		3	3	100	3	6	33,33%
2	1 5	2	1.0 2	3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan	6	1,000,00 0,000	Laporan		1	1	100	1	2	33,33%
2	1 5	2	1.0 3		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Peningkatan Pelayanan di Terminal Tipe B	30	2,000,0 00,000	Terminal		5	1	20	5	6	20,00%
2	1 5	2	1.0 3	1	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Tersusunnya dokumen perencanaan terminal tipe B	30	700,000, 000	Dokumen		5	5	100	5	10	33,33%
2	1 5	2	1.0 3	3	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Terlaksananya pengembangan sarana dan prasarana terminal	30	500,000, 000	Terminal		5	5	100	5	10	33,33%
2	1 5	2	1.0 3	5	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B	Meningkatnya kapasitas SDM pengelola terminal tipe B	30	800,000, 000	Terminal		5	5	100	5	10	33,33%
2	1 5	2	1.0 5		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan	6	7,500,0 00,000	dokumen		1	1	100	1	2	33,33%
2	1 5	2	1.0 5	4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah titik terpantaunya daerah rawan kecelakaan lalu lintas, rawan longsor, dan bencana alam	5	5,000,00 0,000	dokumen		1	1	100	1	2	40,00%
						Terhitungnya Emisi GRK Sektor Transportasi	5		dokumen		1	1	100	1	2	40,00%
						Terinspeksinya daerah rawan kecelakaan lalu lintas	5		dokumen		1	0	0	1	1	20,00%

Kode	Urusan / Bidang / Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Pada Tahun 2021 - 2026		Satuan	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2021 s/d 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program , Kegiatan dan Sub kegiatan (Renja PD Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan					
			Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021			Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11=(6+8+ 10)	12=(11/4)				
			K	Rp.												
		Terlaksananya Kegiatan Pemakaian Kendaraan Derek Untuk Kasus Kecelakaan Lalin	60		bulan		12	0	0	12	12	20,00%				
		terlaksananya pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dengan instansi terkait	30		kali		5	5	100	5	10	33,33%				
		Terlaksananya penyuluhan /sosialisasi keselamatan LLAJ	30		sekolah		5	5	100	5	10	33,33%				
		terlaksananya seleksi penghargaan wahana tata nugraha (tertib lalu lintas)	80		kab/kota		16	0	0	16	16	20,00%				
		Terlaksananya Tugas - tugas Operasional STPJ Prov. Sumbar	60		bulan		12	12	100	12	24	40,00%				
2	1 5	2	1.0 5	5	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Terlaksananya forum komunikasi pejabat PPNS Bidang LLAJ di Sumbar	3	2,500,00 0,000	Kali		1	0	0	0	0,00%	
					Terlaksananya rapat forum lalu lintas dan angkutan jalan		40		Rapat		10	10	100	10	20	50,00%
2	1 5	2	1.0 6		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Tersedianya rekomendasi andalalin	6	120,000 ,000	Dokumen		1	1	100	1	2	33,33%
2	1 5	2	1.0 6	1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Rekomendasi Andalalin	5	120,000, 000	dokumen		1	1	100	1	2	40,00%
2	1 5	2	1.0 7		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Menurunnya tingkat pelanggaran lalu lintas	6	850,000 ,000	dokumen		1	1	100	1	2	33,33%

Kode	Urusan / Bidang / Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Pada Tahun 2021 - 2026		Satuan	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2021 s/d 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program , Kegiatan dan Sub kegiatan (Renja PD Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan					
			Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021			Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)							
1				4		5	6	7	8	9	10	11=(6+8+ 10)	12=(11/4)			
				K	Rp.											
2	1 5	2	1.0 7	2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Pra Akreditasi Unit Pengujian Kendaraan Bermotor	6	250,000, 000	Dokumen		1	0	0	1	1	16,67%
2	1 5	2	1.0 7	3	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Terselenggaranya Pemeriksaan laik jalan angkutan penumpang umum	42	600,000, 000	Kali		7	7	100	7	14	33,33%
						Terselenggaranya Pemeriksaan perizinan kendaraan angkutan penumpang umum diterminal	12		Kali		2	2	100	2	4	33,33%
2	1 5	2	1.0 7	4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Terbinanya dan terciptanya perubahan perilaku pengemudi /awak kendaraan angkutan umum disumbar agar lebih tertib	180	250,000, 000	Orang		36	0	0	36	36	20,00%
2	1 5	2	1.0 8		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Monitoring dan Pembinaan Penyelenggaraan Angkutan Perintis	6	400,000 ,000	Laporan		1	1	100	1	2	33,33%
2	1 5	2	1.0 8	2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Terlaksananya Monitoring dan Pembinaan Penyelenggaraan Angkutan Perintis	6	400,000, 000	Laporan		1	1	100	1	2	33,33%
						Terlaksananya pembinaan dan terawasinya bengkel karoseri industri kendaraan bermotor	32		bengkel karoseri		8	0	0	8	8	25,00%
						Terlaksananya Pembinaan Pengusaha Angkutan	200		orang		50	0	0	50	50	25,00%

Kode	Urusan / Bidang / Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Pada Tahun 2021 - 2026		Satuan	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2021 s/d 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program , Kegiatan dan Sub kegiatan (Renja PD Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan					
			Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021			Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)							
1			4		5	6	7	8	9	10	11=(6+8+	12=(11/4)				
			K	Rp.							10)					
		Umum di Prov. Sumbar														
2	1 5	2	1.1 3		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Tersedianya perawatan sistem informasi perizinan angkutan umum	6	400,000 ,000	Paket		1	1	100	1	2	33,33%
2	1 5	2	1.1 3	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya perawatan sistem informasi perizinan angkutan umum	6	400,000, 000	Paket		1	1	100	1	2	33,33%
2	1 5	3			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan laut yang dikeluarkan sesuai kewenangan provinsi	5		Rekomenda si		1	3	300	1	4	80,00%
						Jumlah Trayek Lintas Penyeberangan	24		Pelabuhan		4	4	100	4	8	33,00%
2	1 5	3	1.0 1		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	Terlaksananya Keselamatan dan Perizinan Angkutan Pelayaran	5	701,500 ,000	Laporan		1	1	100	1	2	40,00%
2	1	3	1.0	1	Fasilitasi Pemenuhan	terlaksananya keselamatan	5	1,500,00	laporan		1	1	100	1	2	40,00%

Kode	Urusan / Bidang / Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Pada Tahun 2021 - 2026		Satuan	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2021 s/d 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program , Kegiatan dan Sub kegiatan (Renja PD Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan					
			Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021			Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)							
1				4		5	6	7	8	9	10	11=(6+8+	12=(11/4)			
				K	Rp.							10)				
	5	1														
		Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
		dan tertibnya perizinan angkutan pelayaran		0												
2	1 5	3	1.0 1	2												
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi			6		700,000, 000		laporan		1	1	100	1	2	33,33%
2	1 5	3	1.0 5													
		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			6		300,000 ,000		Laporan		1	1	100	1	2	33,33%
		Terlaksananya Pengawasan terhadap pelayanan penyeberangan perintis dan angkutan pelayaran rakyat di sumbar														
2	1 5	3	1.0 5	2												
		Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi			6		300,000, 000		laporan		1	1	100	1	2	33,33%
		terlaksananya pengawasan terhadap pelayanan penyeberangan perintis dan angkutan pelayaran rakyat di sumbar														
2	1 5	3	1.0 6													
		Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan			5		100,000 ,000		Laporan		1	1	100	1	2	40,00%
		Terlaksananya pengawasan terhadap perusahaan penunjang angkutan laut														

Kode	Urusan / Bidang / Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Pada Tahun 2021 - 2026		Satuan	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2021 s/d 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program , Kegiatan dan Sub kegiatan (Renja PD Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan					
			Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021			Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11=(6+8+ 10)	12=(11/4)				
			K	Rp.												
		Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas														
2	1 5	3	1.0 6	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	terlaksananya pengawasan terhadap perusahaan penunjang angkutan laut	5	100,000, 000	laporan		1	1	100	1	2	40,00%
2	1 5	3	1.0 8		Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Tersusunnya dokumen DLKr/DLKp Pelabuhan Tua Pejat	5	1,400,0 00,000	1 dokumen		1	1	100	1	2	40,00%

Kode	Urusan / Bidang / Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Pada Tahun 2021 - 2026		Satuan	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2021 s/d 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program , Kegiatan dan Sub kegiatan (Renja PD Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan					
			Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021			Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)							
1					4		5	6	7	8	9	10	11=(6+8+ 10)	12=(11/4)		
2					K	Rp.										
2	1 5	3	1.0 8	1	Pelaksanaan Penyusunan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	tersusunnya dokumen dlkr/dlcp pelabuhan laut tua pejat	5	1,400,00 0,000	dokumen		1	1	100	1	2	40,00%
2	1 5	3	1.0 9		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Terlaksananya pengawasan dan sinkronisasi pengawasan	6	400,000 ,000	Laporan		1	1	100	1	2	33,33%
2	1 5	3	1.0 9	4	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	terlaksananya pengawasan, sinkronisasi dan koordinasi	6	400,000, 000	laporan		1	1	100	1	2	33,33%
2	1 5	3	1.1 0		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya pendataan sarana dan prasarana angkutan sungai dan danau	5	84,840, 034	Laporan		1	1	100	1	2	40,00%
2	1 5	3	1.1 0	4	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	terlaksananya pengawasan terhadap pelabuhan sungai dan danau di sumbar	5	84,840,0 34	laporan		1	1	100	1	2	40,00%
2	1 5	5			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Jumlah Kebijakan penetapan Jaringan jalur KA yang merupakan	5		%		1	1	100	1	2	40,00%

Kode	Urusan / Bidang / Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Pada Tahun 2021 - 2026		Satuan	Realisa si Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2021 s/d 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program , Kegiatan dan Sub kegiatan (Renja PD Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan						
			K	Rp.			Target Renja PD Tahun 2021	Realisa si Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
													7	8	9	10	11=(6+8+ 10)
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11=(6+8+ 10)	12=(11/4)					
		kewenangan provinsi yang ditetapkan															
2	1 5	5	1.0 1		Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Terlaksananya sosialisasi keselamatan kereta api	150			Orang		150	0	150	150	100,00%	
2	1 5	5	1.0 1	2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Tersosialisasinya Keselamatan Perkeretaapian	20	600,000, 000		sekolah		4	4	100	4	4	20,00%
						Tersosialisasinya Keselamatan Perkeretaapian	750			Masyarakat		150	150	100	150	150	20,00%
2	1 5	5	1.0 5		Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Tersedianya penertiban izin usaha, izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum di sumbar	100	200,000 ,000		%		100	100	100	100	100	100,00%
2	1 5	5	1.0 5	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Provinsi	Tersediannya Data jumlah Kecelakaan KA dan data volume lalin pada Perlintasan Sebidang	5	200,000, 000		dokumen		1	0	0	1	1	20,00%
2	1 5	5	1.0 6		Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	Tersedianya fasilitas keselamatan pada perlintasan sebidang Kereta Api	2	200,000 ,000		Paket		1	1	100	1	2	100,00%

Kode	Urusan / Bidang / Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Pada Tahun 2021 - 2026		Satuan	Realisa si Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2021 s/d 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program , Kegiatan dan Sub kegiatan (Renja PD Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan					
			Target Renja PD Tahun 2021	Realisa si Renja PD Tahun 2021			Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)							
1					4		5		6		7		8			
					K	Rp.					11=(6+8+ 10)		12=(11/4)			
2	1 5	5	1.0 6	2	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Terlaksananya perbaikan dan pembuatan pagar atau pembatas kecepatan dan keselamatan pada lintas sebidang jalan kereta api dengan jalan raya	848	200,000, 000	Meter		848	848	100	0	848	100,00%
					tersedianya fasilitas Keselamatan Pada Perlintasan Sebidang Kereta Api	1	Paket			1	1	100	0	1	100,00%	
2	1 5	5	1.0 7		Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringanya Melebihi 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Tersedianya data Penyelenggaraan angkutan Keretaapi disumbar	5	120,000 ,000	Laporan		1	1	100	1	2	40,00%
2	1 5	5	1.0 7	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringanya Menjadi Kewenangan Provinsi	Tersedianya data Penyelenggaraan dan Pengawasan angkutan KA di sumbar	3	120,000, 000	laporan		1	1	100	1	2	66,67%

- 2.1.1 Realisasi program/kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Terdapat 1 Output sub kegiatan yaitu Terlaksananya forum komunikasi pejabat PPNS Bidang LLAJ di Sumbar yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dikarenakan Refocusing Anggaran tahun 2021.
- 2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu 39 (Tiga Puluh Sembilan) sub kegiatan dengan persentase diatas 33%;
- 2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. terdapat program kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
- 2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan. Realisasi capaian target program/kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 secara keseluruhan telah terpenuhi, hal ini didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut:
- a. Pelaksanaan kegiatan yang sesuai rencana yang ditargetkan;
 - b. Dukungan pendanaan dari Pemerintah Daerah;
 - c. Tersedianya dokumen perencanaan pekerjaan;
 - d. Proses pengadaan/pelelangan pekerjaan konstruksi tepat waktu;
 - e. Pekerjaan konstruksi secara fisik selesai sesuai jadwal;
 - f. Kegiatan operasi penumbar dan pemeliharaan rambu dilaksanakan secara rutin;
 - g. Kinerja yang baik dari seluruh staf dinas dalam melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan.
- 2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah:
- Pelaksanaan program dan kegiatan berimplikasi positif terhadap pencapaian kinerja organisasi. Indikator kinerja yang dipakai mengukur kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Secara keseluruhan tingkat capaian

kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat telah memenuhi target.

2.1.6 Faktor penyebab tercapai atau tidak tercapainya realisasi beberapa program/kegiatan karena sifatnya efisiensi anggaran. Dari permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, maka kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diantaranya :

1. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan tujuan organisasi dan kemampuan sumber daya yang tersedia baik SDM maupun alokasi anggaran dalam rangka mendukung pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan.
2. Mempercepat pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran.
3. Mempercepat proses pengajuan keuangan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.
4. Mengoptimalkan peran controlling pada internal Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat agar lebih proaktif dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sehingga target indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai.
5. Monitoring dan evaluasi capaian target keuangan dan fisik dibuat secara periodik sebagai bentuk transparansi dan pengukuran kinerja instansi, dengan didukung oleh keselarasan dan kesesuaian indikator kinerja kegiatan dan indikator kinerja sasaran.

2.2. Analisis Kinerja dan Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

2.2.1. Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang berkedudukan di tingkat provinsi yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Renja PD Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Sebagai unsur pelaksana Pemerintahan Daerah di sektor transportasi, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas membantu

Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :

1. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan.
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perhubungan.
4. Pembinaan dan fasilitasi bidang Perhubungan Lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota.
5. Pelaksanaan Kesekretariatan Dinas.
6. Pelaksanaan tugas di bidang Lalu Lintas dan Pembinaan Keselamatan, Bidang Angkutan Jalan, Perkeretaapian dan Pengembangan, dan Pelayaran.
7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perhubungan.
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK. Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK). Dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat sesuai indikator dan SPM yang ada. Kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat capaian pelaksanaan tugas pokoknya, yaitu indeks layanan kinerja transportasi. Untuk melihat hal tersebut, penilaian capaian kinerja difokuskan pada 4 program utama yaitu Program Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah Provinsi, Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Program Pelayaran dan Program Perkeretaapian.

Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat ditetapkan 5 (lima) yaitu:

1. Persentase Jumlah Sarana perhubungan yang berfungsi baik
2. Persentase Jumlah Prasarana Yang Berfungsi Baik dan Prasarana Yang Dibangun
3. Jumlah Trayek Yang Dapat Diakses
4. Jumlah penambahan penumpang terangkut (orang)
5. Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas

Untuk penjelasan lebih lanjut, dapat digambarkan melalui tabel II.3 berikut:

Tabel II.3 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021 di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan	1. Persentase Jumlah Sarana Yang Berfungsi Baik	51%	52,41 %	102,77 %
		2. Persentase Jumlah Prasarana Yang Berfungsi Baik dan Prasarana Yang Dibangun	23%	23,34 %	101,48 %
2.	Meningkatnya Pelayanan Jasa Transportasi	1. Jumlah Trayek Yang Diakses	5 trayek	5 Trayek	100 %
		2. Jumlah Penambahan Penumpang terangkut	1.000.000 orang	1.127.254 Orang	113 %
3.	Menurunnya Pelanggaran Lalu Lintas	1. Persentase Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas	4,89%	4,16 %	116,298 %
4.	Meningkatnya tata kelola Organisasi	1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (70,00)	BB (70,14)	100,2%
CAPAIAN					105,62%

Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat telah memenuhi target. Dari 5 (lima) indikator tersebut rata-rata sasaran dinyatakan sangat baik jika kriteria capaian sasaran 85% sampai dengan 100% dari target yang telah ditetapkan. Berikut merupakan formulasi dari setiap indikator yang ditetapkan:

Indikator Kinerja Utama 1:

Persentase Jumlah Sarana Perhubungan Yang Berfungsi Baik

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Kendaraan Urus Izin AKDP, AJDP ditahun - n}}{\text{Jumlah Kendaraan AKDP, AJDP di tahun - n}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-1, secara kumulatif tergambar bahwa secara umum capaian kerjanya melebihi target. Indikator 1 yaitu persentase sarana yang berfungsi baik, dengan persentase target sebesar 51% dapat terealisasi sebesar 52,41% dengan capaian kinerja 102,77% %. Hal ini ditunjang dengan lebih dioptimalkannya kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja seperti:

Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase realisasi (%)
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp65.211.200	Rp64.462.000	98,85%
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Rp65.211.200	Rp64.462.000	98,85%
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp30.222.000	Rp5.979.000	19,78%
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rp30.222.000	Rp5.979.000	19,78%

Dari beberapa kegiatan dan sub kegiatan di atas dalam mendukung kinerja sasaran-1 juga berdampak kepada meningkatnya kesadaran operator angkutan umum dalam aturan berlalu lintas yang aman dan selamat untuk menunjang sarana yang lebih baik. Tentunya hal ini juga tidak terlepas dari koordinasi yang baik, juga peran serta seluruh elemen dan instansi yang terlibat dalam pengawasan dan penertiban lalu lintas.

Indikator Kinerja Utama 2:

Persentase Jumlah Prasarana Yang Berfungsi Baik dan Prasarana Yang Dibangun

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Prasarana yang sudah dipasang ditahun } (n - 1) + \text{Realiasi Prasarana yang dipasang di tahun } n}{\text{Target Prasarana yang harus Dipasang}} \times 100\%$$

Indikator kinerja kedua yaitu, persentase prasarana perhubungan yang berfungsi baik. Dengan persentase target sebesar 23% dapat terealisasi sebesar 23,34% dengan capaian kinerja 101,48%. Pencapaian melebihi target ini didorong koordinasi yang baik antar Kab/Kota dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas dan tanpa adanya pengurangan/rasionalisasi anggaran pada tahun berjalan. Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja seperti:

Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase realisasi (%)
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Rp1.268.255.419	Rp1.254.832.858	98,94%
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Rp1.057.110.526	Rp1.045.583.396	98,91%
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Rp211.144.893	Rp209.249.462	99,10%
Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	Rp186.200.000	Rp181.982.627	97,74%
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Rp186.200.000	Rp181.982.627	97,74%

Indikator Kinerja Utama 3:

Jumlah Trayek Yang Diakses

$$\text{Jumlah Trayek yang di Akses di tahun } - n$$

Indikator kinerja ketiga yaitu, Jumlah trayek yang diakses. Dengan target sebesar 5 Trayek dapat terealisasi sebesar 5 Trayek dengan capaian kinerja 100%. Pencapaian sesuai dengan target ini didorong koordinasi yang baik antar Kab/Kota/KL dalam pengawasan Angkutan Umum, Angkutan Perintis, Angkutan Penyeberangan dan Angkutan Laut. Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja seperti:

Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase realisasi (%)
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp65.211.200	Rp64.462.000	98,85%
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Rp65.211.200	Rp64.462.000	98,85%
Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	Rp76.500.000	Rp75.422.675	98,59%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Rp75.000.000	Rp73.922.675	98,56%
Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp74.477.694	Rp73.625.606	98,86%
Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Rp74.477.694	Rp73.625.606	98,86%
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Rp50.000.000	Rp47.794.136	95,59%
Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Rp50.000.000	Rp47.794.136	95,59%
Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp86.715.000	Rp84.840.034	97,84%
Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp86.715.000	Rp84.840.034	97,84%

Indikator Kinerja Utama 4:

Jumlah Penambahan Penumpang terangkut

Target Penumpang tahun (n-1) – Realiasi Penumpang terangkut di tahun n

Indikator kinerja keempat yaitu, Jumlah penambahan penumpang terangkut. Dengan target penambahan 1.000.000 Penumpang dapat terealisasi sebesar 1.127.254 Orang dengan capaian kinerja 113%. Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja seperti:

Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase realisasi (%)
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Rp329.127.787	Rp310.131.964	94,23%
Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Rp100.000.000	Rp99.376.164	99,38%
Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Rp52.890.100	Rp52.688.400	99,62%
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B	Rp176.237.687	Rp158.067.400	89,69%

Dari beberapa kegiatan dan sub kegiatan di atas dalam mendukung kinerja sasaran-2 Peningkatan Jumlah Penumpang Angkutan Umum dikarenakan pada tahun 2021 ini tidak ada lagi penyekatan atau pun aturan Pembatasan pergerakan orang yang melarang perjalanan orang dengan transportasi darat, namun tetap menerapkan protokol Kesehatan di semua prasarana dan sarana transportasi dan membutuhkan telah melaksanakan Vaksinasi sesuai dengan aturan terbaru terkait persyaratan aturan perjalanan orang dengan transportasi darat tertuang dalam Surat Edaran (SE) No. 109 Tahun 2021.

Indikator Kinerja Utama 5:

Persentase Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas

$$\frac{\text{Jumlah AKDP, AJDP yang ditilang ditahun berjalan}}{\text{Jumlah Kendaraan AKDP, AJDP di tahun - n}} \times 100$$

Pada sasaran III capaian untuk indikator kinerja yaitu persentase penurunan pelanggaran lalu lintas dengan persentase target sebesar 4,89% dapat terealisasi sebesar 4,16% dengan capaian kinerja 116,28%. Hal ini ditunjang dengan lebih dioptimalkannya kegiatan dan subkegiatan yang mendukung pencapaian kinerja seperti:

Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase realisasi (%)
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Rp1.649.439.574	Rp1.630.207.968	98,83%
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Rp638.939.574	Rp630.050.750	98,61%
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Rp1.010.500.000	Rp1.000.157.218	98,98%
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Rp206.168.200	Rp205.405.400	99,63%
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Rp40.975.000	Rp40.648.800	99,20%
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Rp165.193.200	Rp164.756.600	99,74%

Tabel II.4 T-C 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

No	Indikator	SPM / Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2021	2022	2023	
1	INDEKS KINERJA LAYANAN TRANSPORTASI (Permendagri 18 Tahun 2020)	a. Peraturan menteri perhubungan RI Nomor 29 tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan menteri perhubungan nomor 98 tahun 2013 tentang standar pelayanan minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek b. Peraturan Menteri Perhubungan RI nomor PM 62 tahun 2019 tentang standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan.	Rasio konektivitas Provinsi	0,661	0,668	0,676	0,673	0,668	0,676	
			Kinerja lalu lintas provinsi	0,54	0,52	0,50	0,52	0,52	0,50	

Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Secara garis besar tingkat kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat meningkat setiap tahunnya, namun ada beberapa indikator yang belum tercapai maksimal disebabkan beberapa faktor. Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat telah melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kab/Kota, KSOP se-Provinsi Sumatera Barat, BTP Sumatera Bagian Barat dan BPTD Wil. III Sumatera Barat yang merupakan perpanjangan tangan dari Dirjen Perhubungan Darat diantaranya melalui Forum Perangkat Daerah Sektor Perhubungan, dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan

Permasalahan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, diantaranya:

1. Belum berkembangnya sistem transportasi massal dan integrasi antar moda angkutan dengan terbatasnya trayek dan volume bus angkutan massal yang tersedia;
2. Belum optimalnya pelabuhan yang ada dalam melayani pergerakan orang dan barang antar pulau dalam Provinsi Riau dan antar provinsi dengan provinsi lainnya.

Kedua permasalahan pokok tersebut menjadi prioritas dalam penyusunan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023. Beberapa faktor penyebab belum optimalnya layanan transportasi di Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian operasional lalu lintas jalan;
2. Belum optimalnya pemasangan, pemeliharaan prasarana lalu lintas dan fasilitas keselamatan jalan;
3. Belum Optimalnya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Pada Ruas Jalan Provinsi;

4. Belum Optimalnya Pelayanan Angkutan Jalan dalam trayek dan tidak dalam trayek;
5. Belum Maksimalnya Keselamatan Angkutan Jalan;
6. Belum Optimalnya Pelayanan Angkutan Perkotaan dan Pemadu Moda;
7. Kurangnya Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Transportasi;
8. Kurangnya Dokumen Kajian Transportasi;
9. Kurangnya Dokumen Regulasi dan Pendataan Transportasi;
10. Belum Optimalnya Pengawasan dan Pengendalian Operasional Pelabuhan;
11. Belum Optimalnya Pembangunan, Pemeliharaan Pelabuhan,
12. Fasilitas Pelabuhan dan Fasilitas Keselamatan;
13. Belum Optimalnya Pengembangan Operasional Angkutan di Perairan;
14. Belum Optimalnya Pembinaan Perusahaan Angkutan di Perairan;

2.3.3 Dampak Permasalahn Dan Hambatan Terhadap Pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah

Permasalahan yang telah dijelaskan diatas dapat berdampak pada pencapaian visi pembangunan jangka menengah lima tahunan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan sebagai Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021–2022, yaitu:

“Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”

Perwujudan Visi Provinsi Sumatera Barat tersebut diatas dilakukan melalui Misi yang digunakan untuk memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Permasalahan tersebut dapat berdampak terutama pada Misi 6 Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat, yaitu :

“Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan”

Beberapa dampak diantaranya:

1. Pembangunan infrastruktur daerah yang belum merata;
2. Belum memadainya sarana, prasarana serta pendukung keselamatan, keamanan, pengendalian dan pelayanan transportasi;
3. Kurangnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi darat guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah.

Selain berdampak pada pencapaian visi misi Kepala Daerah, permasalahan yang dihadapi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat juga berdampak pada capaian program nasional, diantaranya SDGs (*Sustainable Development Goals*), yaitu persentase peningkatan pelayanan transportasi. Semakin tinggi rasio target dan realisasi indikator kinerja pelayanan, maka semakin mendorong pencapaian visi misi Kepala Daerah maupun pencapaian program nasional.

Data capaian IKU Kementerian perhubungan Republik Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.5 Data Capaian Peningkatan Pelayanan Transportasi Nasional

No	Sasaran Strategis (Utama)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Meta Indikator	Target Nasional	Target Daerah	Catatan
1	Terwujudnya konektivitas Nasional	Rasio Konektivitas Transportasi Nasional	Rasio Konektivitas Transportasi Darat (KTD) = (Jumlah KSN, DTPK, dan Pusat Kegiatan Nasional yang terlayani Angkutan Umum dan Angkutan Penyeberangan DIBANDINGKAN Jumlah KSN, DTPK, dan Pusat Kegiatan Nasional yang ditetapkan)	0,695	0,676	KSN = 1 Kawasan Danau Maninjau PKN = 1 Lokasi Kota Padang DTPK = 1 Lokasi Keb. Mentawai
			Jumlah kawasan perkotaan prioritas yang telah dikembangkan sistem angkutan umum massal berbasis jalan DIBANDINGKAN Jumlah kawasan perkotaan prioritas			Beberapa Kota yang ada di Sumatera Barat tidak termasuk kedalam perkotaan prioritas
			Jumlah pelabuhan yang telah dilayani angkutan laut DIBANDINGKAN dengan jumlah pelabuhan laut yang digunakan untuk angkutan laut			Jumlah Pelabuhan laut 4 dan beroperasi ke- 4
			(Jumlah Bandara yang hanya melayani penerbangan niaga berjadwal dalam negeri + Bandara yang hanya melayani penerbangan perintis sesuai dalam KP Perintis + Bandara yang melayani penerbangan niaga berjadwal dalam negeri dan perintis sesuai dalam KP Perintis) DIBANDINGKAN (Jumlah Bandara dalam RINBU (Rencana Induk Nasional Bandar Udara) sesuai KM 166 Tahun 2019 + Bandara yang melayani penerbangan perintis sesuai dengan KP Perintis (tidak masuk			Bukan Kewenangan Provinsi

No	Sasaran Strategis (Utama)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Meta Indikator	Target Nasional	Target Daerah	Catatan
			dalam RINBU)			
			Jumlah wilayah terhubung jaringan layanan KA pada tahun berjalan DIBANDINGKAN jumlah wilayah terhubung jaringan layanan KA sesuai RIPNAS			Belum ada
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan	<i>Hasil survei penilaian publik atas penyelenggaraan angkutan pada masa Lebaran terhadap pelayanan angkutan mudik gratis, angkutan Antarkota Antarprovinsi (AKAP), dan angkutan penyeberangan, serta tingkat pelayanan lalu lintas di jalan. (Pelaksana survei: PPTB – Balitbang – eksternal)</i>	88,40	80	80
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Angkutan Udara (Sesuai dengan Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM)			Bukan kewenangan daerah
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Angkutan Kereta Api (Sesuai dengan Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM)			Tidak ada
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Angkutan Laut (Sesuai dengan Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM)			Tidak ada
		On Time Performance Layanan Transportasi	Nilai OTP pada layanan BRT di 21 LOKPRI Pengembangan Transportasi Metropolitan / Perkotaan	80,26	-	Kewenangan BRT berada pada dishub kota Padang
			Jumlah pelayaran tepat waktu dalam 1 tahun pada 7 lintas utama / Jumlah pelayaran 1 tahun pada 7 lintas utama		-	Tidak ada
			Nilai OTP pada pelabuhan utama dan pengumpul yang telah mencapai target kinerja yang ditetapkan (WT, AT, ET/BT)		-	Tidak ada
			Jumlah penerbangan tepat waktu / Jumlah total penerbangan)		-	Bukan Kewenangan
			keberangkatan / kedatangan angkutan penumpang KA yang tepat waktu pada tahun berjalan		-	Tidak ada

No	Sasaran Strategis (Utama)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Meta Indikator	Target Nasional	Target Daerah	Catatan
			DIBANDINGKAN total keberangkatan / kedatangan angkutan penumpang KA)			
3.	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Rasio kejadian transportasi per 1 juta keberangkatan	Jumlah Kecelakaan AKAP dan Perintis dibagi jumlah perjalanan AKAP dan perintis	26,39	-----Rasio	Tidak ada
			Jumlah kecelakaan ASDP (Komersil dan perintis) dibagi jumlah trip ASDP (komersil dan perintis)		-----Rasio	Tidak ada
			Jumlah kecelakaan transportasi laut / surat perintah berlayar		-----Rasio	Kewenangan pemerintah pusat (KSOP) sesuai UU no. 23 Tahun 2014
			Jumlah insiden kecelakaan angkutan udara/jumlah keberangkatan angkutan udara		-----Rasio	Bukan kewenangan daerah
			Jumlah kecelakaan kereta api/km tempuh perjalanan KA		-----Rasio	Tidak ada

2.3.4 Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Dalam upaya peningkatan pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, terdapat tantangan yang perlu dirumuskan pemecahannya dan peluang yang perlu pencermatan yang baik guna pelaksanaan pengembangan pelayanan transportasi. Berikut ini gambaran kondisi eksisting, tantangan, peluang dan arah pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat:

Tabel II.6 Tantangan dan Peluang Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

No	Kondisi Eksisting	Tantangan	Peluang	Arah Pengembangan Pelayanan
1	Tingginya pelanggaran Over Dimension Over Loading (ODOL) sebagai salah satu penyebab kerusakan jalan yang berdampak kepada keselamatan pengguna jalan	Tingkat kepatuhan perusahaan transporter dan pemilik barang masih rendah	1. Perlunya penguatan terhadap regulasi terkait pengaturan, pembinaan, pengawasan dan sumber daya manusia 2. Dukungan dari stakeholder yang terkait unsur Perhubungan	Dalam menekan tingginya pelanggaran Over Dimensi Over Loading yang sangat berdampak kepada keselamatan pengguna jalan harus dilaksanakannya penegakan hukum secara komprehensif dan berkelanjutan
2	Belum optimalnya pelabuhan Penyeberangan yang ada untuk melayani pergerakan orang dan barang antar pulau dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat (konektivitas antar pulau)	Keterbatasan penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung konektivitas antar pulau	1. Pengembangan angkutan penyeberangan di Provinsi Sumatera Barat sudah menjadi bagian dari cetak biru pengembangan transportasi penyeberangan tahun 2010 – 2030 2. Perlunya penguatan terhadap pengaturan, pembinaan, pengawasan dan sumber daya manusia	Sistem jaringan transportasi darat meliputi jaringan angkutan sungai danau dan penyeberangan (memantapkan lintas penyeberangan antar negara, pelabuhan angkutan penyeberangan serta pengembangan dermaga penyeberangan)
3	Masih ada wilayah kepulauan dan pesisir yang belum terpenuhinya prasarana, sarana dan layanan transportasi yang memadai dalam memperkuat poros maritim di Provinsi Sumatera Barat	Keterbatasan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam memperkuat poros maritim di Provinsi Sumatera Barat	1. Pelimpahan kewenangan pengelolaan Pelabuhan Pengumpan Regional kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2. Kewenangan daerah Provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan	Sistem jaringan transportasi laut meliputi tatanan kepelabuhanan (pelabuhan utama, pengumpul, pengumpan regional seperti pelabuhan Tua Pejat (Kep. Mentawai), pelabuhan Siuban (Kep. Mentawai), pelabuhan Muara Siberut (Kep. Mentawai), pelabuhan Muaro

No	Kondisi Eksisting	Tantangan	Peluang	Arah Pengembangan Pelayanan
				Padang (Padang), pelabuhan pengumpan lokal) dan alur pelayaran (dikembangkannya disepanjang perairan laut dalam)
4	Belum terpenuhinya kebutuhan pelayanan di berbagai moda transportasi	Belum seimbangnya antara kebutuhan dan penyediaan sarana prasarana transportasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen kajian terhadap kebutuhan pelayanan transportasi 2. Penguatan sarana dan prasarana keselamatan transportasi 	Sistem jaringan transportasi darat meliputi jaringan jalan (trans sumatera, pembangunan jaringan jalan bebas hambatan), jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan (terminal penumpang tipe B di lima Kabupaten/Kota
5	Penurunan Level of Service (LoS) jalan yang ditandai peningkatan rasio volume dibandingkan kapasitas jalan salah satunya disebabkan meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor pribadi	Peningkatan volume lalu lintas di bandingkan kapasitas jalan yang tersedia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya Pengawasan dan Pengendalian Operasional Lalu Lintas Jalan 2. Terlaksananya Pemasangan dan Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Jalan 3. Terselenggaranya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Pada Ruas Jalan Provinsi 	Pemenuhan sarana dan prasarana lalu lintas jalan dalam rangka peningkatan Level Of Service (LOS) jalan
6	Belum maksimalnya moda alternatif angkutan barang untuk mengurangi beban jalan (transportasi jalan rel (kereta api) di Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat belum menjadi prioritas utama dalam pembangunan Trans Sumatera Railways System	Cukup Tingginya Pergerakan Angkutan Barang	Sistem jaringan transportasi yang meliputi jaringan kereta api (rencana pengembangan jalur utama, jalur lokal dan pengembangan prasarana serta sarana kereta api antar kota)

No	Kondisi Eksisting	Tantangan	Peluang	Arah Pengembangan Pelayanan
7	Masih kurangnya pendidikan dan pelatihan teknis Perhubungan untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Perhubungan	Masih rendahnya kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis untuk meningkatkan kompetensi SDM Perhubungan	1. Kewenangan pengelolaan terminal tipe B dan pelabuhan pengumpan regional memerlukan SDM yang berkompeten 2. Kewenangan pengawasan dan pengendalian lalu lintas angkutan jalan memerlukan tenaga SDM penegak hukum bidang perhubungan (PPNS)	Dengan peningkatan kompetensi SDM Perhubungan dapat mewujudkan pelayanan transportasi yang optimal

2.3.5 Formulasi Isu-Isu Penting Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Berbagai permasalahan pembangunan bidang perhubungan yang dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari perumusan isu strategis pembangunan bidang perhubungan. Perumusan dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Prasarana dan fasilitas keselamatan jalan di Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) kurang memadai yang berpotensi menimbulkan kerugian yang berdampak pada timbulnya kecelakaan yang dapat menyebabkan luka (injury);
2. Kondisi Fasilitas Pelabuhan Pengumpan Regional, kondisi eksisting Pelabuhan yang mengalami kerusakan sehingga tidak memberikan rasa aman untuk sandar/tambat kapal, turun naik penumpang dan bongkar muat barang di Pelabuhan/dermaga;
3. Sarana transportasi tidak sesuai standar keselamatan, diantaranya Over Dimensi Over Loading (ODOL);

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan kerangka pendahuluan pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah yang berhasil dihimpun dari masyarakat, stakeholder dan pemerintah sendiri. Rancangan Awal RKPD merupakan kunci penting dalam menentukan kualitas seluruh proses penyusunan RKPD. Rancangan Awal menginformasikan rancangan kerangka ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, arah prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja program dan kegiatan yang dilengkapi dengan rancangan pagu indikatif untuk setiap Perangkat Daerah untuk tahun yang direncanakan sebagai acuan bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyiapkan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Rancangan Awal RKPD berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan indikatif untuk tahun yang direncanakan.

Rancangan awal RKPD dibuat dengan melalui proses bottom-up melalui mekanisme Musrenbang yang disesuaikan dengan RPJMD dan Renstra kemudian dilakukan analisis kebutuhan berdasarkan kondisi tahun yang sebelumnya dan prediksi tahun yang akan datang dengan tujuan bahwa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan target. Selanjutnya, berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Perangkat Daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Perangkat Daerah dan dari hasil evaluasi kegiatan yang ada dengan melihat isu strategis, tantangan dan hambatan yang muncul.

Rancangan Awal RKPD ini disusun berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, khususnya penganggaran pada Tahun 2023. Pagu Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah Rp. 26.838.565.762 yang terdiri atas 4 program dengan rincian masing-masing pagu program yaitu sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Rp.17.883.070.000)
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Rp. 6.832.225.762);
3. Program Pelayaran (Rp. 1.783.270.000);
4. Program Perkeretapian (Rp. 340.000.000);

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat. Proses usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan ini diperoleh dari :

1. Menginventarisasi program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan forum musyawarah perencanaan pembangunan-satuan kerja perangkat daerah (Forum Musrenbang-SKPD) berasal dari Dinas Perhubungan Kabupten/Kota yang disampaikan melalui kegiatan Pra-Rakornis Sektor Perhubungan se-Provinsi Sumatera Barat yang tertuang didalam Matrik Inventarisasi Permasalahan urusan di Bidang Perhubungan.
2. Menginventarisasi kebutuhan pagu program kegiatan yang diusulkan serta kompilasi kelengkapan data.
3. Menginventaris kegiatan yang telah atau tidak dapat diakomodir yang merupakan program Dinas Perhubungan berdasarkan skala prioritas.

Usulan program/kegiatan dari pemangku kepentingan diperoleh melalui berbagai forum diskusi (Forum OPD) yang telah dilaksanakan. Selanjutnya usulan program/kegiatan diverifikasi dan dilakukan sinkronisasi ketersediaan pagu anggaran dan kebutuhan. Pada Tahun 2023 terdapat usulan program kegiatan dari pemangku kepentingan, dapat dilihat pada table T-C.32 sebagai berikut:

Selain itu, usulan program dan kegiatan juga berasal dari masukan DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam bentuk Hasil Sidang Reses yang telah diparipurnakan oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat. Untuk usulan Tahun 2022, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat mendapat 8 Pokir yang tersebar di berbagai wilayah di Provinsi Sumatera Barat. Terdapat 5 (lima) usulan pokir yang diakomodir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, yaitu terkait penyediaan perlengkapan jalan. Permasalahan yang disoroti oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat terkait isu-isu mengenai :

1. Kondisi geografis di Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari Daratan dan Perairan belum terhubung dan terjangkau oleh sarana prasarana transportasi secara merata;
2. Kelaikan sarana (bus, taksi, ojol, kapal ASDP, termasuk modifikasi/ODOL);
3. Lokasi, kondisi, dan kelengkapan fasilitas terminal penumpang dan barang serta pelabuhan SDP dan Laut;
4. Integrasi prasarana, jaringan, dan pelayanan antarmoda transportasi;
5. Fasilitas dan perlengkapan jalan dalam mendukung MRLL ;
6. Konektivitas dan kapasitas transportasi antar wilayah melalui transportasi darat dan laut;
7. Efektivitas perpindahan moda angkutan yang belum optimal;
8. Peningkatan pengendalian/penerapan bagi efektivitas pelaksanaan regulasi dan kebijakan di lapangan;
9. Penyusunan regulasi dan kebijakan dibidang transportasi.

Untuk lebih jelasnya, usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan di Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel II.8 berikut:

Tabel II.8 TC.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat dan Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2023 Provinsi Sumatera Barat.

No	Dasar	Sub Kegiatan	Pengusul	Usulan Masalah	Anggaran usulan / Koefisien	Catatan
1	Musrenbang RKPD 2023	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Kota Padang Panjang	Pengadaan warning light diterminal tipe B Kota Padang Panjang	100.000.00	Diakomodir, jika anggaran tersedia dan mencukupi pada APBD 2023
2.	Musrenbang RKPD 2023	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Padang	Jumlah angkutan umum untuk jasa angkutan dan/atau barang antar kota dalam satu daerah Kabupaten/kota sebanyak 6 Koridor	36.112.254.703	Diakomodir, menggunakan APBN
3.	Musrenbang RKPD 2023	Pengawasan dan pengendalian efektifitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan provinsi	Kota Bukittinggi	Jumlah masyarakat/pelajar/Lembaga yang diberi penyuluhan	124.990.600	Diakomodir, jika anggaran tersedia dan mencukupi pada APBD 2023
4.	Pokir	-	ISMUNAND I SOFYAN	Pembuatan kolam khusus pelabuhan Kapal (Bongkar muat) Kec. Tanjung Mutiara	-	Bukan Tusi/kewenangan dishub prov. sumbar dan diarahkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan melalui SIPD
5.	Pokir	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	ARTATI	Pemasangan Lampu penerangan Jalan Provinsi Padang Koto gadang Silungkang Palembang	200 Unit	Usulan koefisien disetujui dengan kebutuhan anggaran Rp. 8.050.000.000
6.	Pokir	-	MUCHLIS YUSUF ABIT	Pembangunan Kantor PJR POLDA Di SILAUT	-	Bukan Tusi/kewenangan dishub prov. sumbar dan diarahkan ke BMKCTR melalui SIPD
7.	Pokir	-	LAZUARDI ERMAN	Penyediaan Timbangan Mobil Portabel di Kabupaten Agam	-	Bukan Tusi/kewenangan dishub prov. sumbar dan diarahkan ke BPKAD

No	Dasar	Sub Kegiatan	Pengusul	Usulan Masalah	Anggaran usulan / Koefisien	Catatan
						melalui SIPD menggunakan anggaran Belanja Transfer
8.	Pokir	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	MUZLI M. NUR	Bantuan Rambu Lalu Lintas Jalan Provinsi	Rambu Uk 60 x 60 = 150 bh Rambu Tiang F = 10 unit	Usulan koefisien disetujui dengan kebutuhan anggaran Rp. 370.000.000
9.	Pokir	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	MUZLI M. NUR	Pagar Pengaman Jalan Gard Rail 100 Meter	100 Meter	Usulan koefisien disetujui dengan kebutuhan anggaran Rp. 175.000.000
10	Pokir	Penyediaan perlengkapan jalan harus berada di jalan provinsi	MUZLI M. NUR	Cermin Tikungan 10 Titik	10 Titik	Usulan koefisien disetujui dengan kebutuhan anggaran Rp. 175.000.000
11	Pokir	Penyediaan perlengkapan jalan harus berada di jalan provinsi	MUZLI M. NUR	Bantuan Marka Zalan Selamat Sekolah Di Tigo Nagari	1 Paket	Usulan koefisien disetujui dengan kebutuhan anggaran Rp. 250.000.000

**Lampiran
Formulir E.29**

**Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Barat**

No.	Jenis kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah provinsi dan Agenda Kerja Perangkat Daerah provinsi.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah	√			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah provinsi tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah provinsi	√			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi.	√			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD provinsi.	√			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	√			
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	√			
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	√			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi.	√			
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kabupaten/kota.	√			
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi.	√			
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah provinsi dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas	√			

No.	Jenis kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	pelaksanaan.				
10.d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah provinsi sesuai surat edaran Gubernur	√			
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√			
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah provinsi.	√			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah provinsi telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah provinsi yang telah disahkan.	√			

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**



HERI NOFIARDI, SE.MM

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19621119 198611 1 001

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA BARAT

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang perhubungan merupakan rumusan perencanaan komprehensif berdasarkan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien.

Visi Kementerian Perhubungan adalah ***“Terwujudnya Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah.”***

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 difokuskan pada 4 aspek, meliputi Konektivitas Poros Maritim, Konektivitas Multimoda, Keselamatan Transportasi, dan Transportasi Perkotaan.

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka ditetapkan misi Kementerian Perhubungan sebagai berikut :

1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi;
2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;
3. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi;
4. Restrukturisasi dan reformasi di bidang peraturan, kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelaksanaan penegakan hukum secara konsisten;
5. Mewujudkan pengembangan transportasi dan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Tabel. III.1
Usulan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada Rakortekrenbang
Tahun Anggaran 2023

No	Program Prioritas	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Strategis	Isu Strategis	Usulan Teknis Daerah				Dukungan Kesiapan Daerah		SKPD Penanggung Jawab
						Prov/Kab/Kota	Rincian Output	Target	Detail Lokasi	Sub Kegiatan	Dukungan	
1	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Infrastruktur Ekonomi	Konektivitas Laut	Pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut	Tidak meratanya pembangunan infrastruktur antar wilayah, terkhusus kawasan kategori daerah tertinggal serta infrastruktur pendukung kawasan pariwisata	Sumatera Barat/Kab. Mentawai	Pengembangan pelabuhan laut siberut/ simalepet	1 Paket	Kab. Mentawai, Pulau Siberut , Simalepet/ Siberut	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan	- RIP - DED Tahun 2022 - Dokumen - Lingkungan Lahan Tersedia	Dinas Perhubungan
2	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Infrastruktur Ekonomi	Konektivitas Laut	Pembangunan dan pengembangan pelabuhan penyeberangan	Tidak meratanya pembangunan infrastruktur antar wilayah, dan infrastruktur pendukung kawasan pariwisata	Sumatera Barat/Kota Padang, Bungus	Lanjutan pembangunan penyeberangan Bungus	1 Paket	Kota Padang, Bungus	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan	- RIP - DED - Dokumen - Lingkungan Lahan Tersedia	Dinas Perhubungan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan faktor – faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dalam mendukung Misi 6 Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan dan melaksanakan Sasaran Kepala Daerah yaitu Peningkatan Efisiensi Pergerakan Orang dan Barang. Dinas Perhubungan mempunyai tujuan Meningkatnya konektivitas antar wilayah dan Terwujudnya keselamatan transportasi dengan indikator kinerja yaitu :

- a. Rasio Konektivitas Provinsi
- b. Kinerja Lalu Lintas

Pada tahun 2023, terdapat beberapa target yang harus di capai oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat terkait IKD, Progul dan Program sesuai dengan Renstra 2021 – 2026 Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, Penetapan Progul 2021 - 2026 dan RPJMD Prov. Sumatera Barat tahun 2021 - 2026 diantaranya :

Tabel. III.2
Target IKD, Progul dan Program pada tahun 2023

No	Indikator	Target tahun 2023	Keterangan
1	Rasio Konektivitas Provinsi (Rasio)	0,675	IKD
2	Kinerja Lalu Lintas (Rasio)	0,50	IKD
3	Jumlah penumpang terangkut angkutan umum (orang)	20.000.000	IKD
4	Jumlah Terminal Provinsi dengan toilet laki-laki dan Perempuan yang layak (akumulasi) (unit)	2 Terminal	Progul Terminal Padang Panjang dan Terminal Sago Painan
5	Jumlah Terminal Provinsi dengan sarana cuci tangan yang layak (akumulasi) (unit)	2 Terminal	Progul Terminal Padang Panjang dan Terminal Payakumbuh

No	Indikator	Target tahun 2023	Keterangan
6	Jumlah Terminal Provinsi dengan sarana air bersih yang layak (unit)	2 Terminal	Progul Terminal Padang Panjang dan Terminal Sago Painan
7	Jumlah Terminal Provinsi dengan sarana air minum yang layak (unit)	1 Terminal	Progul Terminal Padang Panjang
8	Jumlah terminal Type B yang beroperasi dan termanfaatkan dengan baik (unit)	5 Terminal	Progul a. Terminal Padang Panjang b. Terminal Payakumbuh c. Terminal Sago Painan d. Terminal Sawahlunto e. Terminal Batusangkar
9	Jumlah dokumen perencanaan lingkungan Pelabuhan yang ditetapkan (dokumen)	2 Dokumen	Progul - Jumlah Dokumen RIP PelabuhanPenyeberangan Sinakak yang tersusun (1 dokumen) -Jumlah Dokumen DED Simalepet yang tersusun /Jumlah Dokumen FS Pelabuhan Laut Sinakak yang tersusun (1 dokumen)
10	Jumlah Pelabuhan yang beroperasi dengan baik mendukung distribusi produk pertanian dan perikanan (Pelabuhan)	4 Pelabuhan Penyeberangan dan 4 Pelabuhan Laut	Progul Pelabuhan Penyeberangan : -Pelabuhan Bungus di Padang -Pelabuhan Tua Pejat di Mentawai -Pelabuhan Sikakap di Mentawai -Pelabuhan Siberut di Mentawai Pelabuhan Laut : -Pelabuhan Tua Pejat di Mentawai -Pelabuhan Muaro Padang diPadang -Pelabuhan Siberut /Simalepet diMentawai -Pelabuhan Sioban di Mentawai
10	Jumlah integrasi antar moda yang terbangun (jumlah) : Persentase Realisasi Perkada tentang dokumen RIJLLAJ Provinsi (%)	100%	Progul Realisasi Perkada tentang dokumen RIJLLAJ Provinsi

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Visi Misi Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat, melalui visi yaitu **“Terwujudnya Sumatera Barat madani, yang unggul dan berkelanjutan”**.

Arah kebijakan dan strategi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 untuk sektor Perhubungan, difokuskan pada misi 6 (enam),

yaitu: **“Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan”**. Sehingga dirumuskan strategi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat yaitu Meningkatnya pelayanan transportasi, dengan 2 (dua) arah kebijakan, meliputi:

- a. Rasio Konektivitas Provinsi
- b. Kinerja Lalu Lintas

Dengan demikian menunjukkan bahwa adanya relevansi antara visi misi Kementerian Perhubungan, visi misi Kepala Daerah periode berjalan dengan dukungan strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dalam membantu mewujudkan visi misi tersebut. Untuk mendukung Visi Misi Provinsi Sumatera Barat dan Visi Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan telah melengkapi usulan Pemerintah Daerah pada Rakortekbang Tahun Anggaran 2023. Program dan Kegiatan merupakan upaya dalam mengimplementasikan strategi dan kebijakan OPD dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah di rencanakan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Peragkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Kegiatan merupakan Tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh organisasi dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Selanjutnya program dan kegiatan haruslah memiliki alat ukur yang jelas dan disusun untuk dapat menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan dari suatu program dan kegiatan yang disebut dengan indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut bersifat kualitatif (tolak ukur) dan kuantitatif (target kinerja) yang secara khusus dinyatakan sebagai bentuk pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat pemantauan dan evaluasi kinerja

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2023 sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat termasuk dunia usaha yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. Bagi satuan kerja pelaksana program, RKPD Tahun 2023 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2023 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran. Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2023 dan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023 benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas.

Disamping itu seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mulai membuat rencana aksi dalam upaya penggalian dan memobilisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan. Partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan perlu didukung dengan kepastian hukum dan kemudahan pelayanan. Pelaksanaan kegiatan RKPD Tahun 2023 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkauan aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Penerapan prinsip *safe guarding* akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat luas dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan sehingga keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting bagi terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

Dalam mencapai sasaran strategis ini dana dibutuhkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp. 26.838.565.762 meliputi 4 program, 23 Kegiatan dan 61 sub kegiatan yang dirumuskan dalam rencana kerja tahun 2023 yaitu:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah: 9 kegiatan dan 37 sub kegiatan;
2. Program penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) : 9 kegiatan dan 18 sub kegiatan;
3. Program pengelolaan pelayaran : 3 kegiatan dan 4 sub kegiatan;
4. Program perkeretaapian : 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan;

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN										26,838,565,762		21,990,100,000	
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										17,883,070,000		15,140,100,000	
2	15	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										480,000,000		475,000,000	
2	15	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Terlaksananya sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	100 %	2 Dokumen	85 %	120,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	120,000,000
2	15	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah (RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD dan Dokumen Perubahan DPA SKPD) yang disusun	Terlaksananya sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	100 %	4 Dokumen	85 %	35,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	25,000,000
2	15	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja SKPD yang Disusun	Terlaksananya sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	100 %	3 Dokumen	85 %	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	30,000,000
2	15	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Buku Statistik Perhubungan yang Didistribusikan Jumlah Dokumen Evaluasi dan Monitoring Kinerja SKPD Jumlah Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Terlaksananya sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	100 %	85 Buku 1 Dokumen 1 Dokumen	85 %	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	300,000,000
2	15	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										10,320,000,000		9,940,000,000	
2	15	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah ASN dan Calon ASN yang Dibayarkan Gaji dan Tunjangannya	Tertib administrasi keuangan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	100 %	100 Orang	100 %	9,900,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	9,500,000,000
2	15	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah ASN yang Mendapatkan Honor	Tertib administrasi keuangan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	100 %	17 Orang	100 %	350,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	350,000,000
2	15	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Dokumen SPP, SPM, dan Pnegesahan SPJ yang Diterbitkan	Tertib administrasi keuangan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	100 %	1 Dokumen	100 %	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	15,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	15	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah ASN yang Mengikuti Sosialisasi Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	100 %	12 Orang 4 Kali	100 %	70,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	25,000,000
2	15	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimtek	Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	100 %	10 Orang	100 %	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	40,000,000
2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								2,658,070,000				855,100,000
2	15	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	100 %	1 Set Alat Listrik	100 %	35,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	40,000,000
2	15	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	100 %	3 Lemari Arsip 3 Pengancur Kertas 4 Filing Cabinet 4 Lmari Besi 12 Papan Jabatan	100 %	110,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	80,000,000
2	15	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Rapat Koordinasi Internal Perangkat Daerah Yang Dilakukan	Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	7 Jenis 40 Kali	100 %	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	155,000,000
2	15	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	100 %	350000 Lembar 0 Paket	100 %	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	105,000,000
2	15	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Bahan Bacaan dan peraturan Perundang - undangan yang Disediakan	Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	100 %	3 Jenis	100 %	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	25,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	15	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu terkait Hari Koperasi Nasional ke 76 Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu terkait penyediaan transportasi Penas XVI Petani Nelayan	Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan 1 Laporan	100 %	1,893,070,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100,000
2	15	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi	Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	100 %	1 Dokumen	100 %	350,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	450,000,000
2	15	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					395,000,000						210,000,000	
2	15	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Mebel yang Disediakan Jumlah Mebel yang Disediakan	Tersedianya Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	100 %	2 Kursi Ess III 2 Meje Ess III 7 Kursi Ess IV 7 Meja Ess IV 40 Kursi Kerja 40 Meja Kerja	100 %	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	85,000,000
2	15	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Disediakan Jumlah Peralatan dan Mesin yang Disediakan	Tersedianya Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	100 %	2 AC 1PK 2 Laptop 3 AC 2PK 5 PC 7 Printer	100 %	145,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	125,000,000
2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2,570,000,000						2,230,000,000	
2	15	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar Dalam 1 Tahun	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	100 %	1450 Surat	100 %	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	25,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
																		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
																							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	02	1.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase penurunan rasio angka kecelakaan lalu lintas	Jumlah Ruas Jalan Provinsi yang dipasang perlengkapan jalannya	Terpasangnya perlengkapan jalan di jalan provinsi	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,45 %	3 Ruas Jalan Provinsi	24 %	1,500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penurunan rasio angka kecelakaan lalu lintas	2,45 %	1,500,000,000													
2	15	02	1.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Persentase penurunan rasio angka kecelakaan lalu lintas	Jumlah ruas jalan provinsi yang di rehab dan dipelihara perlengkapan jalannya	Terpasangnya perlengkapan jalan di jalan provinsi	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,45 %	1 Ruas Jalan Provinsi	24 %	210,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penurunan rasio angka kecelakaan lalu lintas	2,45 %	300,000,000													
2	15	02	1.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B								687,722,162					510,000,000													
2	15	02	1.03	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Persentase Fasilitas Utama dan Penunjang Terminal Tipe B yang terbangun	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Terminal	Terlaksananya Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	41,51 %	2 Dokumen	5 Terminal	230,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Fasilitas Utama dan Penunjang Terminal Tipe B yang terbangun	41,51 %	0													
2	15	02	1.03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Persentase Fasilitas Utama dan Penunjang Terminal Tipe B yang terbangun	Jumlah Terminal yang dilakukan Pengembangan Sarana dan Prasarana	Terlaksananya Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	41,51 %	2 Terminal	5 Terminal	177,722,162	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Fasilitas Utama dan Penunjang Terminal Tipe B yang terbangun	41,51 %	200,000,000													

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	15	02	1.03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Persentase Fasilitas Utama dan Penunjang Terminal Tipe B yang terbangun	Jumlah Terminal yang Terehabilitasi dan Terpelihara Fasilitas Utama dan Pendukungnya	Terlaksananya Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	41,51 %	2 Terminal	5 Terminal	230,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Fasilitas Utama dan Penunjang Terminal Tipe B yang terbangun	41,51 %	250,000,000
2	15	02	1.03	05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B	Persentase Fasilitas Utama dan Penunjang Terminal Tipe B yang terbangun	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe B yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Terlaksananya Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	41,51 %	30 Orang	5 Terminal	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Fasilitas Utama dan Penunjang Terminal Tipe B yang terbangun	41,51 %	60,000,000
2	15	02	1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi							1,550,305,000		1,200,000,000			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	15	02	1.05	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas	Jumlah Dokumen Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan provinsi Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pengawasan efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan provinsi Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi Jumlah peserta penyuluhan atau sosialisasi keselamatan LLAJ	tertibnya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi yang dilaksanakan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,45 %	1 Dokumen 6 Kali 0 Laporan 75 Orang 6 Sekolah	100 %	1,275,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas	2,45 %	800,000,000
2	15	02	1.05	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi Jumlah rapat Forum LLAJ dan Rapat Bidang LLAJ yang dilaksanakan	tertibnya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi yang dilaksanakan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,45 %	0 Laporan 4 Kali	100 %	275,305,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas	2,45 %	400,000,000
2	15	02	1.06		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi					75,000,000						25,000,000	
2	15	02	1.06	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Persentase penurunan rasio angka kecelakaan lalu lintas	Jumlah Pengawasan Pelaksanaan rekomendasi Andalalin	Terlaksananya pengawasan pelaksanaan rekomendasi andalalin		2,45 %	3 Kali	100 %	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penurunan rasio angka kecelakaan lalu lintas	2,45 %	25,000,000
2	15	02	1.07		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					620,000,000						440,000,000	
2	15	02	1.07	02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas	Jumlah Inspeksi dan audit, pemantauan serta pengawasan unit PKB Jumlah Laporan Data Akreditasi Unit PKB Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Tertibnya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan yang dilaksanakan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,45 %	8 UPUBKB 1 Laporan 0 Laporan	100 %	60,000,000		Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas	2,45 %	60,000,000
2	15	02	1.07	03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas	Jumlah inspeksi, audit, Laik Jalan dan pemantauan terminal yang terlaksana Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Tertibnya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan yang dilaksanakan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,45 %	15 Kali 1 Laporan	100 %	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas	2,45 %	200,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2	15 02 1.07 04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi Jumlah Pelajar Pelopor tingkat provinsi yang peduli keselamatan LLAJ Jumlah pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor provinsi Jumlah pengemudi / awak kendaraan umum tingkat provinsi yang profesional dan peduli keselamatan LLAJ	Tertibnya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan yang dilaksanakan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,45 %	1 Laporan 36 Orang 2 Kali 36 Orang	100 %	310,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas	2,45 %	180,000,000
2	15 02 1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								399,700,000					400,000,000
2	15 02 1.08 02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Persentase penurunan rasio angka kecelakaan lalu lintas	Jumlah dokumen data Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Jumlah pengawasan angkutan perintis yang dilakukan	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian angkutan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,45 %	1 Dokumen 20 Kali	100 %	399,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penurunan rasio angka kecelakaan lalu lintas	2,45 %	400,000,000
2	15 02 1.10	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								179,498,600					160,000,000
2	15 02 1.10 01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Persentase penurunan rasio angka kecelakaan lalu lintas	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek AKDP Kewenangan Provinsi	Tertibnya jaringan trayek AKDP kewenangan provinsi		2,45 %	1 Dokumen	100 %	179,498,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penurunan rasio angka kecelakaan lalu lintas	2,45 %	160,000,000
2	15 02 1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								30,000,000					35,000,000
2	15 02 1.13 01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan Jumlah Perangkat SIMPAU yang dilakukan pemeliharaan	Tertibnya Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		2,45 %	1200 Kendaraan 1 Perangkat	100 %	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas	2,45 %	35,000,000
2	15 03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN								1,783,270,000					1,880,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	15	03	1.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi					125,000,000				150,000,000				
2	15	03	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jumlah rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan laut yang dikeluarkan sesuai kewenangan provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Angkutan Laut Perintis	Tertibnya pengawasan pelaksanaan angkutan laut perintis	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Padang, Padang Barat, Berok Nipah Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Rekomendasi	1 Laporan	100 %	125,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan laut yang dikeluarkan sesuai kewenangan provinsi	1 Rekomendasi	150,000,000
2	15	03	1.05	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					100,000,000				110,000,000				
2	15	03	1.05	02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Trayek Lintas Penyeberangan	Jumlah laporan Pengawasan Trayek Lintas Penyeberangan	Tertibnya Pengawasan Trayek Lintas Penyeberangan	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Barat	4 Trayek	1 Laporan	100 %	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Trayek Lintas Penyeberangan	4 Trayek	110,000,000
2	15	03	1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional					1,558,270,000				1,620,000,000				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	15	03	1.09	02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Trayek Lintas Penyeberangan	Jumlah Dokumen FS Pelabuhan Laut Sinakak Jumlah Dokumen FS Pelabuhan Penyeberangan Sinakak	Tersedianya dokumen pembangunan pelabuhan	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Sinaka	4 Trayek	1 Dokumen 1 Dokumen	2 Dokumen	1,450,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Trayek Lintas Penyeberangan	4 Trayek	1,500,000,000
2	15	03	1.09	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Trayek Lintas Penyeberangan	Jumlah Laporan sinkronisasi, koordinasi dan pengawasan Pelabuhan Pengumpan Regional yang dilaksanakan	Tersedianya dokumen pembangunan pelabuhan	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Trayek	1 Laporan	2 Dokumen	108,270,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Trayek Lintas Penyeberangan	4 Trayek	120,000,000
2	15	05			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN							340,000,000					400,000,000
2	15	05	1.03		Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							230,000,000					250,000,000
2	15	05	1.03	01	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	Jumlah Kebijakan Penetapan Jaringan jalur KA yang merupakan kewenangan provinsi yang ditetapkan	Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi yang ditetapkan	Tertibnya Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	4 Dokumen	100 %	230,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kebijakan Penetapan Jaringan jalur KA yang merupakan kewenangan provinsi yang ditetapkan	1 Dokumen	250,000,000
2	15	05	1.06		Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi							110,000,000					150,000,000
2	15	05	1.06	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Jumlah Kebijakan penetapan Jaringan jalur KA yang merupakan kewenangan provinsi yang ditetapkan	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Tertibnya Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	110,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kebijakan penetapan Jaringan jalur KA yang merupakan kewenangan provinsi yang ditetapkan	1 Dokumen	150,000,000
										TOTAL			26,838,565,762				21,990,100,000

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 menjadi sangat penting artinya untuk menjadi acuan terkait dengan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.

Sebagai dokumen perencanaan, dokumen ini mengikat secara Kelembagaan dalam pelaksanaan Program kegiatan pada Tahun 2023 yang tidak lepas dan terkait dengan dokumen Renstra, RKPD, RPJMD dan RPJPD. Secara lanjut dokumen ini juga menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja yang lebih terarah dan terkoordinasi sehingga dapat menghasilkan Rencana Kerja yang lebih baik.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat ini dibuat, untuk dipergunakan sebagai pedoman bersama dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kedinasan serta pedoman dalam penyusunan RKA Tahun 2023, yang memuat rancangan kerangka prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya.

Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk konsisten mengimplementasikan visi, misi, tujuan dan sasaran dalam program serta kegiatan yang akan dicapai dalam 5 Tahun ke depan sesuai jangka waktu RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021 -2026.

Padang, Oktober 2022

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

HERI NOFIARDI, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19621119 198611 1 001